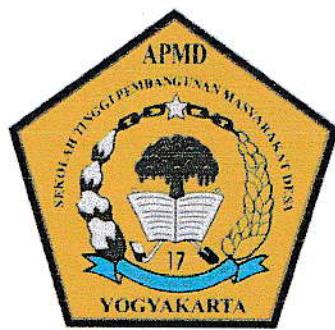


**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM
MENINGKATKAN KAPASITAS PAMONG**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

ASHAR ABDILLAH
22610018

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024



**PENGESAHAN
TESIS**

**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM
MENINGKATKAN KAPASITAS PAMONG**

Yang disusun oleh:

**ASHAR ABDILLAH
22610018**

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 11 Juli 2024

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)
Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si

Penguji I
Dr. Supardal, M.Si

Penguji II
Dr. Sugiyanto, S.Sos., MM







Yogyakarta, 11 Juli 2024

Mengetahui
**Direktur Program Magister
Program Studi Ilmu
Pemerintahan**




Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ashar Abdillah

NIM : 22610018

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul "**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PAMONG**" merupakan benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Ashar Abdillah

MOTTO

"Mempunyai adab (kebaikan budi pekerti) meskipun sedikit adalah lebih kami butuhkan daripada (memiliki) banyak ilmu pengetahuan"

(Ibnu al-Mubarak)

"Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, jadi aku mengubah diri sendiri"

(Rumi)

"Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi"

(Buya Hamka)

"Ilmu Pemerintahan bertujuan memperjuangkan Pemerintahan Kerakyatan yang sanggup menghadirkan Negara untuk Warga"

(Dr. Sutoro Eko Yunanto)

"Sebaik-baiknya Amalan, adalah Ilmu yang Bermanfaat"

(Kutipan Ulama)

"Kita adalah bagian dari perayaan yang tak kunjung usai"

(Ashar Abdillah)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti ingin mempersembahkan tesis ini untuk semua orang yang mempunyai peranan penting dalam hidup peneliti:

1. Untuk Ibu dan Ayah saya “Hamisah dan Muh. Amir. B” yang tidak pernah lelah dalam membimbing serta selalu mendoakan dalam berbagai proses yang sedang dihadapi. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya dalam melanjutkan pendidikan. Karya ini sebagai bentuk bakti peneliti kepada orang tua, yang tentunya dirasa tidak akan pernah cukup untuk membala semua kebaikan Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah menjadikan peneliti sebagai pribadi yang tangguh, dewasa, dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup.
2. Untuk saudara-saudari saya atas segala dukungan dalam berbagai proses termasuk dalam penyelesaian studi ini.
3. Untuk Dosen Pembimbing peneliti Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si, terima kasih yang sebesarnya-sebesarnya peneliti haturkan. Atas bimbingan dan kesabaran Bapak selama ini sehingga karya ini dapat selesai dengan baik. Mohon maaf jika ada perkataan atau perilaku peneliti yang kurang berkenan. Semoga Allah membala semua kebaikan Bapak.
4. Untuk seluruh almamater STPMD ‘APMD’ di Yogyakarta.
5. Untuk teman-teman Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 29.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister (S-2) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan penelitian tesis dengan judul **“STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PAMONG”** tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan maupun rintangan, sehingga dalam penyusunan penelitian tesis ini penulis merasa masih jauh dari kata sempurna.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan maupun saran-saran yang berguna dalam penyusunan penelitian tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pikiran dalam memberikan semangat, arahan dan bimbingan serta menguji tesis ini.
2. Dr. Sugiyanto, MM, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’ di Yogyakarta.
3. Para dosen dan staff akademik Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa ‘APMD’ di Yogyakarta.
4. Keluarga besar penulis yang terus memberikan spirit dalam menuntaskan tugas akhir.
5. Pemerintahan Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok Sleman yang telah memberikan waktu selama proses penelitian.
6. Rekan-rekan MIP 29 yang selalu menjadi spirit dalam menjalankan perkuliahan.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam mendukung terselesainnya Tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam segala aktivitas yang saat ini sedang di luangkan.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Penulis,

Ashar Abdillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Fokus Penelitian	9
E. Literatur Review.....	9
F. Kerangka Konseptual	16
1. Strategi	16
2. Kapasitas Pamong Kalurahan.....	19
3. Kapasitas Pemerintah	24
4. Pemerintah Desa.....	28
BAB II METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Obyek Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisi Data.....	42

G. Keabsahan Data.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	52
A. Sejarah Kalurahan Condongcatur	52
B. Keadaan Geografis Kalurahan Condongcatur	53
C. Budaya Kalurahan Condongcatur	59
D. Sarana Prasarana Kalurahan Condongcatur.....	60
E. Pemerintah Kalurahan Condongcatur	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	72
A. Deskripsi Informan	72
B. Analisis Stategi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Meningkatkan Kapasitas Pamong.....	72
1. Analisis <i>Tecnical Skill</i>	73
a. Studi Orientasi.....	75
b. Koordinasi	79
2. Analisis <i>Human Skill</i>	87
a. Studi Banding	88
b. Pemahaman Tupoksi.....	95
c. Rekrutmen Pamong	98
3. Analisis <i>Conspitual Skill</i>	102
a. Studi Lanjutan	103
b. Bimtek	108
C. Analisis Faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur.....	124
1. Faktor penghambat	125
2. Faktor pendukung.....	131
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144

C. Keterbatasan Penelitian	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Informan.....	39
Tabel 3.1 Jumlah wilayah Padukuhan, RT dan RW	54
Tabel 3.2 Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan	56
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	58
Tabel 3.5 Fasilitas Pendidikan Kalurahan Condongcatur	60
Tabel 3.6 Fasilitas Peribadatan Kalurahan Condongcatur	61
Tabel 3.7 Fasilitas Kesehatan Kalurahan Condongcatur	62
Tabel 3.8 Fasilitas Umum Kalurahan Condongcatur.....	63
Tabel 3.9 Fasilitas Prekonomian Kalurahan Condongcatur.....	63
Tabel 3.10 Pamong Kalurahan Condongcatur	66
Tabel 4.1 Kapasitas Pamong Peningkatan Pendidikan	107
Tabel 4.2 Peningkatan Kapasitas Condongcatur.....	116
Tabel 4.3 Data Program Peningkatan Kapasitas.....	119
Tabel 4.4 Reformasi Birokrasi	122
Tabel 4.5 Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat	131
Tabel 4.6 Analisa Penguatan Kapasitas	135
Tabel 4.7 Analisa Strategi Penguatan Kapasitas Pamong.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram rata-rata pendidikan perangkat desa tahun 2021	3
Gambar 1.2 Rata-rata Pendidikan Pamong Kalurahan Condongcatur.....	4
Gambar 2.1 Analisis Data Model Interaktif.....	37
Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Condongcatur	65
Gambar 4.1 Koordinasi kelembagaan pamong	85
Gambar 4.2 Pola Prekrutan Pamong Kalurahan Condongcatur.....	91
Gambar 4.3 Berita Acara Prekrutan Pamong.....	94
Gambar 4.4 Kegiatan Studi Banding	100
Gambar 4.5 Kegiatan Bimtek.....	111
Gambar 4.6 Pola penguatan kapasitas.....	118

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Kampus
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Penelitian

INTISARI

Penyelenggaraan pemerintah desa tentu saja tak terlepas dari pada sumber daya aparatur. Saat ini dikonotasikan dengan sumber daya manusia (SDM) dengan profesionalisme rendah yang terlihat dari indikator pelayanan yang belum optimal, penggunaan waktu tidak produktif, belum optimalnya peran dan inovasi dalam menjalankan tugas. Dalam meningkatkan pembangunan didesa tentunya tak terlepas daripada penguatan kapasitas aparatur. Kalurahan Condongcatur menempatkan peningkatan kapasitas dengan peningkatan melalui pendidikan maupun pelatihan serta pendampingan kepada pamong kalurahan. Kalurahan Condongcatur dari aspek kapasitas tentunya baik, olehnya itu dalam penelitian ini mengeksplor bagaimana langkah strategis dalam peningkatan kapasitas tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, model Kualitatif Fenomenologi. Lokasi penelitian di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok Sleman. Adapun Informan terdiri dari Lurah, Carik, Plt. Jogoboyo, Tatalaksana, Staf, Pendamping Kalurahan, Kapanewon Depok. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: identifikasi data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Technical Capasity* dari kapasitas teknis ini dapat dikategorikan kedalam dua poin yang menjadi fokus pengembangan dalam meningkatkan kapasitas pamong melalui studi orientasi dan koordinasi, (2) *Human Skill* kemampuan individu pada penguatan bagi pamong sendiri berdasarkan dari hasil penelitian diantaranya yakni studi banding, pemahaman tupoksi, rekrutmen pamong, (3) *Conceptual Skill* Kemampuan konseptual dalam penguatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur diantaranya studi lanjutan, Bimtek. Orientasi dari kemampuan konseptual skil yaitu mengukur kemampuan dalam memutuskan serta menentukan kebijakan strategis dalam merumuskan kebijakan. Selain itu dari segi penguatan kapasitas seringkali masih banyak hal-hal yang masih kurang dalam memaksimalkan aspek dalam menguatkan kapasitas pamong.

Kata kunci: *Kapasitas, Pamong*

ABSTRACT

The administration of village government is of course inseparable from apparatus resources. Currently it is connoted with human resources (HR) with low professionalism which can be seen from service indicators that are not yet optimal, unproductive use of time, not yet optimal roles and innovation in carrying out tasks. Improving development in villages is of course inseparable from strengthening the capacity of the apparatus. Condongcatur sub-district focuses on increasing capacity through education, training and assistance to sub-district officials. Condongcatur sub-district is certainly good in terms of capacity, therefore this research explores strategic steps in increasing capacity.

The type of research in this research is qualitative research, the Qualitative Phenomenology model. The research location is Condongcatur Village, Kapanewon Depok Sleman. The informants consisted of the Village Head, Carik, Plt. Jogoboyo, Management, Staff, Village Assistants, Kapanewon Depok. The technique for determining informants used is a purposive technique. Data collection techniques use observation, documentation and interviews. The data analysis technique is carried out in stages: data identification, data reduction, data presentation, data interpretation and drawing conclusions.

The research results show that (1) Technical Capacity of this technical capacity can be categorized into two points which are the focus of development in increasing the capacity of civil servants through orientation and coordination studies, (2) Human Skill, individual ability to strengthen the civil servants themselves based on research results including namely comparative studies, understanding main duties, recruitment of civil servants, (3) Conceptual Skills Conceptual skills in strengthening the capacity of civil servants in Condongcatur District include advanced studies, technical guidance. The orientation of conceptual skills is measuring the ability to decide and determine strategic policies in formulating policies. Apart from that, in terms of capacity strengthening, there are often still many things that are still lacking in maximizing aspects of strengthening civil service capacity.

Keywords: Capacity, Pamong

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dimaknai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam konsep asas Subsidiaritas dan Rekognisi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 7 sebagaimana dimaksud pada tata pemerintahan Desa yakni ayat 3 yang berbunyi: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa. b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, dan e. meningkatkan daya saing desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini terkait tata kelola pemerintahan yang pada dasarnya berkaitan dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, serta mempengaruhi urusan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan di desa. Dari berbagai kekhawatiran yang melanda desa dalam menyelenggarakan pemerintah tak terlepas dari masih kurangnya sumberdaya aparatur desa itu sendiri.

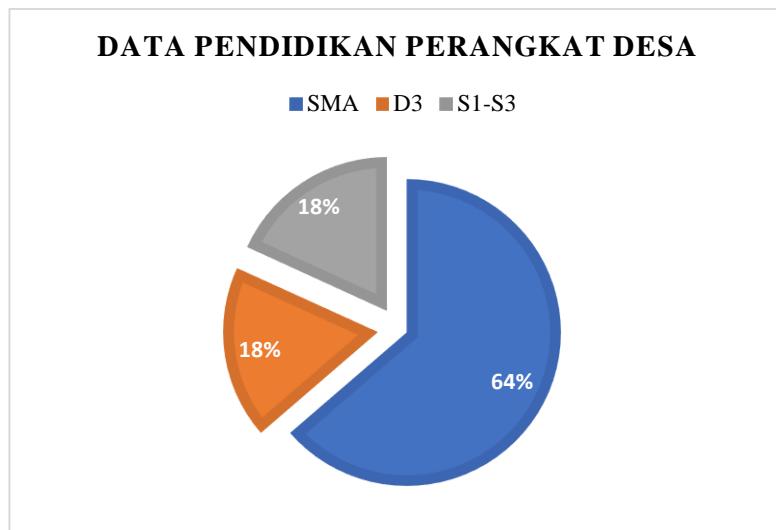
Penyelenggaraan pemerintah desa tentu saja tak terlepas dari pada sumber daya aparatur. Saat ini dikonotasikan dengan sumber daya manusia (SDM) dengan profesionalisme rendah yang terlihat dari indikator pelayanan yang belum optimal, penggunaan waktu tidak produktif, belum optimalnya

peran dan inovasi dalam menjalankan tugas. Indikasi rendahnya SDM setidaknya tercermin dari tiga hal, yakni kesejahteraan, reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) (Satria & Rosnani, 2021). Lebih lanjut terkait dalam menjalankan tatanan pemerintahan didesa, tentu saja kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan desa diharapkan senantiasa menerapkan prinsip keadilan, kenyamanan serta efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Membangun desa dibutuhkan dengan kapasitas aparatur pemerintahan yang baik. Maka itu dapat diwujudkan dengan adanya kapasitas pemerintahan desa.

Hal yang menyangkut masih kurangnya kapasitas aparatur desa menjadi suatu faktor penghambat sehingga masih kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintah di desa. Dengan adanya pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa, memerlukan dukungan kapasitas dari perangkat desa untuk mampu merencanakan kegiatan program pembangunan yang inovatif berdasar pada kebutuhan di desa. Namun faktanya, masih banyak perangkat desa yang belum memiliki kapasitas untuk merencanakan kegiatan program pembangunan di desa (Syahruddin Hattab, Daswati, 2022).

Perangkat pemerintah desa sendiri lebih cenderung tidak dipilih atau ditempatkan berdasarkan kompetensi, hal ini pula yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sementara itu untuk kapasitas yang meningkat tentu tak terlepas dari aspek pendidikan yang menjadi poin terpenting selain itu pula dengan adanya pelatihan serta pendampingan. Menurut data di

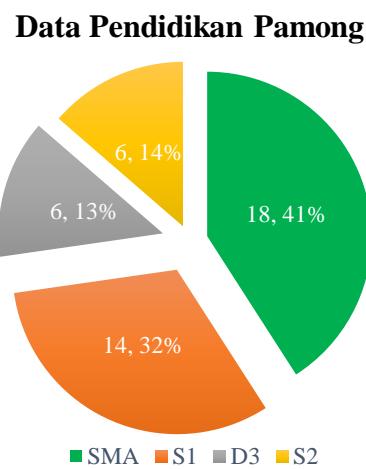
Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021 sebanyak, 18 persen aparatur desa merupakan sarjana, dari D3 hingga S3, 64 persen merupakan lulusan SMA.



Gambar 1.1 Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021

Dari uraian tersebut terlihat masih kurangnya kapasitas pemerintah desa yang dilihat dari pada tingkat pendidikan. Inilah yang memperlihatkan ketidak seimbangan didesa, oleh sebab itu penting adanya dorongan untuk meningkatkan kapasitas baik dari segi peningkatan strata pendidikan diranah pemerintahan desa, maupun dengan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas. Para perangkat desa di sebutkan “pamong desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga, para pamong desa selalu dituakan dipercayai oleh masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa.

Sementara itu pada Kalurahan Condongcatur Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dalam hal terkait kapasitas pamong yang tentu saja akan menjadi optimal dalam penyelenggaraan pemerintah di Kalurahan Condongcatur itu sendiri. Hal ini akan memberikan dampak perkembangan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 1.2 Data Pendidikan Pamong Kalurahan Condongcatur

Dari rata-rata tingkat pendidikan perangkat/pamong Kalurahan Condongcatur yang memiliki tingkat pendidikan sampai jenjang sarjana. Hampir secara keseluruhan perangkat/pamong mulai dari Kasi, Kaur dan staf Kalurahan Condongcatur yang menempuh pendidikan sarjana. Dengan tingkat pendidikan maupun pelatihan bagi pamong kalurahan akan memberikan pengaruh dalam menjalankan tata pemerintahan di kalurahan itu sendiri.

Kalurahan sendiri penyebutan khusus untuk desa pada wilayah di DIY merujut pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dalam penyebutan nomenklatur bagi Desa mengandung nilai-nilai lokal

disebut Kalurahan, hal ini kemudian yang menarik dan berbeda penyebutannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu dari peraturan daerah tersebut tentang nomenklatur sebutan Kalurahan, selain itu dalam penyebutan aparatur Kalurahan, Kepala Desa disebut Lurah, Sekertaris Desa disebut Carik, Kasi Pemerintahan disebut Jagabaya, Kasi kesejahteraan disebut ulu-ulu, Kasi Sosial Kamituwa sebagai pelaksana teknis dalam pemerintahan dikalurahan. Lanjut itu pada wilayah sekretariat kalurahan Kaur TU dan Umum disebut Tata Laksana, Kaur Keuangan disebut Danarta, Kaur Perencanaan disebut Pangripta.

Dalam hal ini peneliti mengangkat pelaksanaan peningkatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Pada pelaksanaan dapat dilihat bahwasanya strategi pemerintah kalurahan dalam penguatan kapasitas pamong terntunya akan berdampak dalam meningkatnya tatanan pemerintahan di Kalurahan. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah kalurahan sangat memperhatikan terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur sebagai upaya dalam menjalankan peran penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat yang menjadi dua kata kunci penting. Hal ini terlihat dari pada tingkatan pendidikan masing-masing pamong yang rata-rata lulusan sarjana dan bahkan sampai kejenjang S2.

Kalurahan Condongcatur menempatkan peningkatan kapasitas dengan peningkatan pendidikan maupun pelatihan serta pendampingan kepada pamong kalurahan. Dengan peningkatan kapasitas tentu saja dalam rangka mewujudkan penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat. Kapasitas dan kinerja kalurahan menjadi komponen penting dalam mendorong kemandirian. Sebagaimana kapasitas pemerintah desa melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan kewenangannya. Kapasitas pemerintah desa menjadi parameter penting bagi pencapaian kinerja pemerintahan desa (Rizal et al., 2022).

Dalam meningkatkan pembangunan didesa tentunya tak terlepas daripada penguatan kapasitas aparatur. Sehingga dengan kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa dalam melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sumber daya yang tersedia di desa baik sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana. Oleh dari itu penguatan sumberdaya manusia, dan disiplin aparat Desa menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya kapasitas aparatur desa yang meningkat.

Tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah Desa, serta segenap komponen (stakeholders) yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.

Maka dari uraian tersebut peneliti tertarik tentang bagaimana strategi peningkatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kinerja Pamong Kalurahan. Dari itu peneliti mengangkat Judul **“Strategi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam Meningkatkan Kapasitas Pamong”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka dalam penelitian ini terkait bagaimana strategi pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas pamong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui:

- A. Bagaimana strategi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas pamong.
- B. Faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur

2. Manfaat

- a) Manfaat Akademik Penelitian ini diharapkan memberikan referensi tentang strategi Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan kapasitas pamong. Serta pula sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya terkait penguatan kapasitas pemerintahan kalurahan.

- b) Manfaat Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan menambah wawasan bagi Lurah dalam meningkatkan kapasitas pamong dalam menyelenggarakan tatanan pemerintahan.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan tersebut, maka fokus penelitian ini terkait bagaimana Strategi Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas pamong yang merujuk pada teori kapasitas menurut Robert L. Katz (1955) mengemukakan 3 indikator utama.

1. Kapasitas Teknis (*Thecnical Capasity*) yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas, keterampilan. Kapasitas aparatur dalam hal kemampuan teknis memberikan gambaran mengenai keterampilan aparatur dalam menyusun dokumen-dokumen kelengkapan administrasi. Dari segi membangun konsep tersebut kebijakan ini menumbuhkan sinergitas antar pamong.
2. Kemampuan Individu (*Human Skill*) yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan, memobilisasi keterampilan dan kemampuan individu kemampuan untuk bekerjasama. Secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Kemampuan tersebut didapatkan melalui kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pamong dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
3. Kemampuan Konseptual (*Conseptual Capasity*) yaitu kemampuan dalam mengetahui kebijakan, kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan

untuk melakukan berbagai aktifitas berfikir, menalar, dan memecahkan masalah. Konsep ini diupayakan dalam menguatkan dari aspek pengetahuan pamong kalurahan.

E. Literatur Rewiew

Dalam melihat perbandingan konsep pelaksanaan Tata Pemerintahan Desa dalam berbagai penelitian dengan tema Tatakelola Pemerintah Desa yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

1. Sitti Aminah, Hari Prasetyo Sutanto (2018) Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. kapasitas aparat desa tergolong cukup namun belum optimal mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui penambahan intensitas, memperpanjang waktu dan pedalaman materi, disertai praktik secara teknis dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan dalam diklat. Peningkatan pendampingan (melalui pelibatan pendamping Desa dan Lembaga Pemerhati Desa) juga diperlukan disamping meningkatkan intensitas sosialisasi UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dapat dilakukan melalui menambah intensitas keikutsertaan aparat desa dalam diklat pemerintahan desa dengan memperbanyak waktu dan pendalaman materi diserta praktek tentang manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa. Disamping meningkatkan intensitas pendampingan

dengan melibatkan pendamping Desa dan Lembaga Pemerhati Desa. Meningkatkan kemampuan akses informasi bagi aparatur desa, dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, penyuluhan dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik antar aparatur desa dengan supradesa (pemerintah di tingkat kecamatan dan Kabupaten), juga intensitas pendampingan oleh pendamping desa dan lembaga pemerhati.

2. Martitah, dkk (2020) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengembangan Inovasi Kebijakan Program Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. Kapasitas desa perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa yang modern, akuntabel dan partisipatif. Tim pengabdian menemukan data bahwa aparatur desa Selorejo memiliki keterbatasan pengetahuan tentang tata kelola dana desa, dikarenakan input sumber daya manusia yang menjadi aparatur desa berbeda dengan kelurahan. Kondisi ini berimplikasi terhadap kemampuan inovasi perencanaan pembangunan akibat kurangnya pengetahuan drafting peraturan desa. Terkait itu, tim pengabdian memberikan pemahaman bahwa Undang-Undang Desa memberikan otonomi yang kuat bagi desa untuk membuat program-program desa yang inovatif, asalkan saja dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, tim pengabdian merekomendasikan

adanya pendampingan secara kontinu bagi aparatur desa dalam merancang peraturan desa dan penyusunan program-program desa, baik oleh perguruan tinggi maupun instansi vertikal desa yang terkait.

3. Jennifer I. R. Dhue, Frans B. Tokan (2021) Berbasis pada teori pengembangan kapasitas dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ekstraksi yang dimiliki pemerintah desa hanya mampu memanfaatkan aset-aset publik desa yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi desa semata. Demikian juga halnya dengan kapasitas responsif, pemerintah desa ternyata kurang mampu merespon berbagai aspirasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan kapasitas jaringan dan kerjasama masih terbatas hanya pada kegiatan KKN mahasiswa tanpa kerjasama lain yang dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu ada penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa dan masyarakat sehingga mampu membuat perencanaan yang lebih berkualitas merespon kepentingan mayoritas masyarakat desa dan lebih mampu bersinergi dengan berbagai lingkungan eksternal.
4. Dekki Umamur Ra'is (2022) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD). Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah

desa merencanakan, melaksanakan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pengelola keuangan desanya. Dampaknya, banyak masalah dan tantangan yang dihadapi desa, pemerintah harus memiliki kesiapan untuk melakukannya, salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ruang besar yang diberikan oleh undang-undang tersebut bukan tanpa konsekuensi, ada potensi konflik, baik itu vertikal dan horizontal. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis perangkat desa.

5. Mustari, N dkk (2022) Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Pasca Pandemi Covid-19. Adapun main theory yang digunakan untuk hasil penelitian adalah teori dari Eade (1997) terkait 3 strategi utama pengembangan kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan kapasitas birokrasi di kota Makassar sudah terpenuhi dengan baik, hal ini dibuktikan dari hasil analisis bahwa semua indikator penguatan kapasitas meliputi (1) penguatan organisasi dan manajemen terealisasi melalui adanya reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkot Makassar, (2) penyediaan sumber daya sarana dan prasarana, dengan hadirnya program strategis seperti pembangunan tol layang dan lainnya, dan (3) network, berfokus

pada mitra atau kerjasama, dimana Pemkot Makassar melakukan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB).

6. Ilham Zitri, dkk (2022) Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kapasitas Pendampingan Desa adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan/Tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendampingan Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Melihat kondisi Desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitasnya dan bahkan potensi SDA dan SDMnya sangat bervariatif, maka peran pendampingan desa dalam rangka implementasi UU Desa ini sangat penting dalam membantu desa melaksanakan amanah UU Desa tersebut. Melihat realitas kondisi desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitas Pemerintahan Desa dan bahkan potensi SDA dan SDMnya sangat bervariatif dalam rangka implementasi UU Desa ini, maka perlu adanya perhatian kepada Desa tentang kelembagaan Desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. UU

Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa.

7. Susi Krisjuyani (2023) Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa. Kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai penyelenggara pemerintahan di desa. Kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa. Pertama, terdapat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan desa, hal tersebut memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya. Membangun desa berdasarkan kepentingan bersama bukan berdasar pada kepentingan individu. Kedua, partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di desa, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka pemerintah desa memiliki kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Ketiga, kapasitas pemerintah desa di ukur dari beberapa indikator, yaitu kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, dan motivasi, serta sumber daya manusia. Indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain demi terwujudnya kapasitas pemerintah desa dalam membangun desa.

Dari beberapa jurnal penelitian yang membahas mengenai penguatan kapasitas pemerintah desa dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Secara persamaan ulasan terkait dengan penguatan kapasitas perangkat desa. Tentunya tak terlepas dalam penguatan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa. Dalam penelitian Sitti Aminah dan Hari Prasetyo Sutanto menunjukkan Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui diklat dengan pendalaman materi disertai dengan praktik. Lalu pada penelitian Susi Krisjuyani menguraikan kapasitas diukur dari berbagai indikator diantaranya kemampuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya manusia. Tentu dalam pelaksanaan didesa sebagai upaya mewujudkan kapasitas pemerintahan desa.

Dari uraian penelitian terdahulu menilai bahwasanya tolak ukur kinerja aparatur mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan, ini menjadi konsen dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan. Selain itu penguatan kapasitas bisa didapatkan dengan peningkatan pendidikan, pelatihan serta pendampingan bagi aparatur desa. Sementara itu dalam penelitian ini, peneliti menkonsepsikan bagaimana strategi pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas pamong.

F. Kerangka Konseptual

Pada bagian landasan konseptual ini, penulis memaparkan tentang landasan teori yang akan menjadi acuan untuk kerangka pikir penelitian. Landasan konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian yang berhubungan atau mendukung topik yang diteliti oleh penulis.

1. Strategi

Strategi merupakan pengembangan rencana panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi dikemukakan J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, (2003) yang meliputi misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan (A. H. Ginting et al., 2020)

Dalam pandangan Craig dan Grant, strategi yaitu penetapan tujuan dan sasaran dalam jangka panjang (*Targeting and long-term goals*). Sedangkan Kenneth Andrew strategi runutnya tentang pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Secara generalnya strategi dalam artian bagian bentuk dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Lanjutnya dari Mintzberg, Steiner dan Miner dalam Rangkuti (1998) mengungkapkan strategi adalah respon yang dilakukan secara terus-menerus ataupun adaptif terhadap peluang dan ancaman (eksternal) serta kekuatan dan kelemahan

(internal) yang dapat membuat pengaruh bagi organisasi (Muslimah et al., 2021).

Strategi bisa dikatakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bintaro (dalam Rusdiananingtyas, 2006: 1899) mengartikan bahwa strategi sebagai keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan pasti, guna mencapai suatu tujuan untuk mengatasi suatu permasalahan, dimana dalam strategi itu terdapat metode dan teknik. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkatan atas dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah besar.

Lanjut penjelasan Carpenter, Mason A, Sanders, strategi adalah cara yang dikoordinasi oleh organisasi mengejar sasaran dan tujuannya. Strategi demikian meliputi pola tindakan yang telah diambil dan mereka yang direncanakan akan diambil oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. *Capacity Building* Menurut Grindle sebagaimana yang dikutip oleh (Soeprapto, 1997, h. 6-22); *Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency building* (Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksud untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*), *effectiveness* dan *responsiveness* kinerja pemerintah (Nugroho et al., 2016).

Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Adapun batasan-batasan yang dibutuhkan, yaitu tentang apa yang harus dilakukan dan untuk siapa sehingga nantinya tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. *Program strategy* (Strategi Program) Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Misalnya harus mengetahui Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi) Sehingga tidak terjadi kendala-kendala yang di inginkan.
- c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi pendukung sumber daya baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya esensial ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi program. Hal demikian

dikarenakan strategi program lebih mengutamakan dampak dari suatu kegiatan itu diperkenalkan dan dilakukan. Strategi program lebih mengedepankan manfaat dari suatu kegiatan yang akan dilakukan.

2. Kapasitas Pamong Kalurahan

Bicara terkait dengan kapasitas pamong kalurahan, dalam hal ini untuk satus apatatur desa disebutkan pamong kalurahan. Erat kaitannya dalam menyongsong berbagai keterampilan dan keahlian aparatur desa dalam pelaksanaan desa menjadi suatu komponen yang penting yang harus dimiliki setiap aparatur desa.

Keterampilan dan keahlian aparatur menentukan hasil dari pelaksanaan dana desa itu sendiri, sehingga keterampilan itu sangat penting dan juga perlu ditingkatkan apabila masih ada kekurangan dari aparatur itu sendiri. Pengembangan kapasitasa menjadi suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan perubahan multi-level didalam individu, kelompok organisasi dan system dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada (Morison;2014).

Menurut Merilee S. Grindle (2014) Fokus Pengembangan Kapasitas: a. Development of the human resources (Pengembangan SDM); b. Strengthening organization (Penguatan Organisasi); c.

Reforming of institution (Penataan Kelembagaan) (Syahruddin Hattab, Daswati, 2022). Fokus dalam pengembangan kapasitas pamong kalurahan menjadi satu kesatuan yang harus ditata dalam rangka mengoptimalkan proses pelaksanaan tatanan pemerintahan. Posisi kalurahan dengan segala kompleksitas termasuk terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia dalam hal ini pamong kalurahan, penguatan tatanan pemerintahan, penataan kelembagaan yang menjadi penting dalam rujukan agar lebih ditingkatkan.

Dalam meningkatkan kemampuan atau dalam hal ini kapasitas menurut Geene (2003; 5-6) menuturkan tiga tingkatan kapasitas, yaitu tingkatan sistem, organisasi dan individu. Kapasitas sistem adalah tingkat kapasitas yang paling tinggi. Dimensi kapasitas sistem meliputi: 1) dimensi kebijakan; 2) dimensi hukum/peraturan; 3) dimensi manajemen/akuntabilitas, 4) dimensi sumber daya; 5) dimensi proses antar-hubungan.

Pada pandangan Madiyono mengemukakan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik terlihat pada kapasitas aparatur pemerintah itu sendiri. Kapasitas aparatur pemerintah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah, karena berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan akan dinilai dari kinerja aparatur pemerintah dengan komposisi kapasitas personel dalam organisasi tersebut. Kapasitas organisasi merupakan potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-

program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (Utama et al., 2020).

Sementara itu pada orientasi kemampuan menurut A.Fiszbein dalam Keban 2008, peningkatan kemampuan selalu berhubungan dengan; (1) Kemampuan tenaga kerja (labour), (2) Kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan, (3) Kemampuan “capital” yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumber daya, sarana, dan prasarana (Jennifer. R. Dhue1, 2021).

Kapasitas terbagi menjadi 3 jenis kemampuan dasar menurut Robert L. Katz (1955) yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu:

- 1) *Technical Skill* (kemampuan teknis), pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.
- 2) *Human Skill* (kemampuan bersifat manusiawi), kemampuan untuk bekerja dalam kelompok dimana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah.

3) *Conceptual Skill* (kemampuan konseptual), kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu (Krisjuyani, 2023).

Ditinjau dari segi penguatan aparaturnya, dalam penuturan Fauzi (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga level peningkatan kapasitas (Tauvik et al., 2023) yaitu:

1. Level individual kapasitas yang diperlukan mencakup aspek-aspek kognitif (pengetahuan dan keahlian teknokratik), afeksi (komitmen, motivasi, konsistensi, dan sikap-sikap altruistik lainnya), dan evaluatif (visi, misi, daya inisiatif, dsb) individual penyelenggarakan pemerintahan.
2. Level Organisasional, kapasitas yang diperlukan mencakup keseluruhan semua mata-rantai pembuatan kebijakan publik mulai dari tahapan agenda setting dan perumusan kebijakan hingga pada implementasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
3. Tingkat sistem, kapasitas yang diperlukan menyangkut kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapasitas individu dan organisasional sebagai sebuah prosedur, mekanisme, dan standar baku dalam kerja pemerintah daerah

Sementara itu dalam upaya bagi penguatan kapasitas pemerintah desa yakni :1. Menetapkan tujuan dan rencana kegiatan Pengembangan Kapasitas untuk desanya (rencana tahunan dan rencana multi-tahun) dengan bimbingan dari Kec/Fasbel; 2. Menyediakan alokasi anggaran

bagi kegiatan Pengembangan Kapasitas desanya di dalam APB Desa; 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mandiri dengan bimbingan Kec/Fasbel (dalam konteks implementasi program pengembangan kapasitas aparatur desa) secara optimal dan akuntabel; 4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas lain melalui inisiatif sendiri untuk melengkapi kegiatan pengembangan kapasitas yang diinisiasi oleh pemerintah.

Menurut Rozaki, dkk (2005) ada tiga alasan utama mengapa organisasi desa perlu diperkuat, yakni: (1) kapasitas desa memang terbatas dalam menjalankan fungsi regulasi, pelayanan dan pemberdayaan; (2) sejak dulu penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah; (3) kapasitas pemerintah desa merupakan sebuah esensi dan basis otonomi desa. Itu berarti penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa sangatlah mendesak sesuai tuntutan global dan regulasi negara (Jennifer. R. Dhue1, 2021). Dalam rujukan inilah yang menjadi ulasan sehingga pentingnya desa dalam memperkuat kelembagaan, lanjut dalam aspek Desa kemampuan untuk mengelola pembangunan lebih mandiri perlu didukung oleh semua unsur mengingat sumber daya desa yang masih belum terkelola dengan baik sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih bagi masyarakat miskin di desa.

Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan (Kushartono et al., 2022). Kapasitas pemerintah desa tentunya terkait dengan kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan kewenangannya. Kapasitas pemerintah desa menjadi parameter penting bagi pencapaian kinerja pemerintahan desa. Dengan kata lain, pencapaian kinerja pemerintahan desa yang baik hanya akan terwujud jika mendapat dukungan dari individu, organisasi dan sistem yang memadai (Rizal et al., 2022).

SDM pemerintah desa menjadi hal terpenting dalam melaksanakan tata pemerintahan yang ada didesa. Selain itu yang tidak kalah penting dalam memberikan motivasi kerja, pemberian reward atas kinerja bagus akan memberikan nilai dalam menguapayakan pelaksanaan tata pemerintahan yang optimal kepada masyarakat itu sendiri. Selain itu Menurut Sinambela (2012) disiplin kerja menjadi poin yang tidak kalah pentingnya yang diwujudkan dengan cara sejauh mana seseorang mampu melakukan suatu pekerjaannya secara kontinyu tanpa melanggar peraturan yang berlaku atau norma-norma yang telah ditetapkan. Disiplin kerja dapat dilihat menggunakan beberapa

indikator seperti ketepatan waktu, tanggungjawab, dan ketaatan terhadap aturan kantor (Ayuningtyas, 2023).

3. Kapasitas Pemerintah

Kapasitas sebagai suatu konsep dalam menganalisa sejauh mana optimalnya penyelengaraan pemerintahan. Dalam pandangan Milen (2001) dalam menegaskan bahwa kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk menggerakkan dan mewujudkan fungsi-fungsinya secara efektif dan berkelanjutan, itu berarti kapasitas tidak hanya dipandang dari sudut pandang yang statis tetapi juga memiliki makna dinamis yang terus mengalami perubahan dan adaptasi berdasarkan tuntutan perubahan yang makin cepat dan variatif (Mustari et al., 2022). Sementara itu menurut Grindle, 1997 mengemukakan Pengembangan Kapasitas diartikan sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable* (kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai secara Efektif, Efisien dan berkelanjutan) (Norman et all., 2020).

Lanjutnya Grindle dan Brown mengatakan pengembangan kapasitas merupakan upaya yang ditujukan untuk mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas kinerja pemerintah. Pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai (Kapriaji & Siswidiyanto, 2022).

Dalam kaitannya untuk menerangkan kapasitas maka bentuk kapasitas pemerintah yang dapat digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Kapasitas Regulasi (mengatur), berupa kemampuan pemerintah mengatur kehidupannya sendiri beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan daerah, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat;
- b) Kapasitas Ektraktif, kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset dalam menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat;
- c) Kapasitas Distributif, yaitu kemampuan pemerintah dalam membagi sumber daya secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Uraian tersebut menjabarkan erat aspek pengembangan kapasitas dalam skop pemerintahan. Secara komprehensif mengacu pada *capacity building*, yakni meningkatkan kemampuan SDM, kelembagaan dan jaringan. Tentunya dalam perkembangan dalam merepresentasikan kapasitas pemerintah menjadi tugas semua elemen dengan mereduksi konsep-konsep matang yang muaranya menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas pemerintah. Tentunya dengan peningkatan kapasitas menjadi cikal bakal dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dideal. Salah satunya dalam konsep pelayanan pada motivasi serta integrasi yang berimbang terhadap kinerja aparatur. Artinya bahwa,

pelayanan publik yang berkualitas dengan kompetensi aparatur yang professional, harus diikuti oleh proporsional reward yang diterimanya sebagai motivasi untuk peningkatan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat (Hayat, 2020).

Pada penjabaran teori diatas mendudukan sebagaimana kapasitas sebagai pemahaman serta keterampilan secara personal dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam desa. Dalam menumbuhkan pelaksanaan pemerintah desa yang ideal tentu tak terlepas pada pengoptimalkan kapasitas perangkat desa. Dengan merefleksikan posisi desa yang terus dipandangan masih kurang pada segi tatanan pemerintahan, maka dari itu penguatan kapasitas aparatur desa menjadi poin terpenting dalam mewujudkan kontestasi pelaksanaan yang ideal sebagai upaya dalam meningkatkan penghidupan dan kehidupan kepada masyarakat itu sendiri.

Secara runut dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam peruntukan mengupayakan penghidupan dan kehidupan. Tentunya tak terpelas daripada penguatan kapasitas Aparatur pemerintahan, selain itupula dalam segi aspek pemberian motivasi seperti reward dan juga dalam bentuk lainnya menjadi acuan dalam pengimplementasian ditengah-tengah masyarakat. Banyak hal yang masih kurang khususnya dalam fermine pemerintah desa, ini masih sangat jauh dari cita-cita para pejuang dalam menilai desa sebagai ujung

tombak pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah desa harus memiliki motivasi.

Seperti di ketahui bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam maupun dari luar individu yang dimiliki oleh seorang dalam melakukan sesuatu demi terwujudnya tujuan. Dalam membangun desa, pemerintah desa tentu memiliki motivasi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Pada penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak lepas dari peran sumber daya manusia sebagai subjek dalam menjalankan roda pemerintahan tertentu.

4. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa menjadi ujung tombak dalam pemerataan pembangunan nasional, melalui konsep yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dodo dengan kalimat “Desa Membangun Indonesia”. Sejak reformasi 1998, wewenang aparatur pemerintah desa tidak diperoleh sepenuhnya, karena program-program pemberdayaan masyarakat melarang desa untuk turut serta dalam proses pembangunan tersebut (Agusta, 2014). Peran pembinaan dalam program pembedayaan masyarakat ditangani oleh konsultan pendamping dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional (Irawan, 2017:31). Dengan hadirnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menjabarkan dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dikonstruksikan sebagai bagian dari gerakan reformasi (Siregar dan Wahono, eds, 2002).

Dalam pandangan Sabatier dan Mazmaniah (1979, 1983) aparatur pelaksanaan harus memiliki keterampilan manajerial dan politis yang substansial serta berkomiteman terhadap tujuan kebijakan. Efektivitas implementasi UU 6 2014 dipengaruhi oleh kapasitas aparatur pemerintah desa (Gos, 2001). Kapasitas agensi tersebut berwujud proses pembelajaran yang selalu dilaksanakan aparatur pemerintahan desa (Etheredge dan Short, 1983). Pembelajaran dimulai dari pelatihan aparatur pemerintah desa dan dilanjutkan dengan praktek hasil pelatihan dalam organisasi pemerintahan desa.

Dari frase “membangun desa” dan “desa membanguan”, dari konsep tersebut dapat turunkan menjadi pembangunan pedesaan (*rural development*) dan pembangunan desa (*village development*) (Eko, 2015:51). Premis dasar yang seharusnya dikembangkan dalam tata pemerintah dan pembangunan kesejahteraan adalah desa maju dan sejahtera, otomatis negara juga maju dan sejahtera. Titik pangkal dari maju dan sejahteranya suatu bangsa adalah desa (Muqowam, 2019:50). Hakekat desa dalam UU Desa ada 3 yakni kepentingan masyarakat setempat, prakarsa lokal dan musyawarah desa.

Desa adalah Fakta Sejarah dan Sosiologis, tetapi batang tubuh UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan Desa secara eksplisit. UUD 1945 hasil amandemen juga tidak mengenal Desa secara eksplisit, padahal pada era reformasi, aspirasi otonomi desa begitu kuat membahana diseluruh pelosok negeri. Sebagai respon mereka atas UU

No. 5/1979 yang merusak menghancurkan otonomi desa. Dalam UUD 1945, desa menempati residuen dan volksgemeenschappen” atau Pemerintah lokal dan kesatuan masyarakat hukum adat atau komunitas desa (Muqowam, 2019:69).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khaidir Ali, 2020). UU No. 6 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 206 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas (Ichwan, 2019).

Undang-undang Desa membawa pembangunan untuk menjawab “masa lalu desa”, menuju kemajuan, keluar dari ketertinggalan, keterbelakangan dan kemiskinan. Kata “maju” pernah dikatakan oleh Sutan Sjahrir pada 1945, dan juga ditegaskan oleh UU Desa. UU Desa menegaskan desa harus maju tetapi tidak meninggalkan tradisi, dan tetap merawat tradisi tetapi tidak ketinggalan zaman (Muqowam, 2019:68). Desa sebagai entitas (kesatuan) masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal itu berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki

otonomi. Hanya saja otonomi desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, tetapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat (Timotius, 2018).

Posisi Desa memiliki Dua asas “rekognisi” dan “subsidiaritas” memberikan hak “mengatur” dan “mengurus” Desa dan Desa Adat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UU Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul (Tamam, 2023).

Asas rekognisi yaitu bentuk pengakuan dan penetapan desa berdasarkan asal-usul, sedangkan asas subsidiaritas yaitu bentuk pengakuan dan penetapan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola dapurpemerintahannya sendiri yang bertujuan pada kepentingan masyarakat desa. Hal ini menegaskan bahwa Desa dengan UU Desa ini memiliki posisioning yang otonom, desa diakui sebagai hak asal usul, seperti penjelasan sebelumnya bahwa desa sejak dulu sudah otonom, dan asas subsidiaritas, kewenangan yang berskala lokal desa dalam mengatur segala aktivitas penyelenggaraanya (Pamungkas, 2019)

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan fungsi *self-governing community* (Suhendar, 2020). Tentu saja dalam UU tentang Desa menjabarkan bahwa tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Untari et al., 2022). Hal ini menjadi poin dalam penyelenggaraan pemerintah khusunya dalam prakarsa kehendak desa sesuai dengan konteks, kepentingan, dan aspirasi lokal.

Kewenangan akan memberikan dasar dan manfaat kepada desa :

- (a) kewenangan desa membuat urusan, masalah, dan aset lokal bisa ditangani secara tuntas ditingkat desa; (b) kewenangan desa yang lebih jelas membuat desa berfungsi atau bermanfaat untuk warga dan negara;
- (c) kewenangan desa merupakan alat untuk mengarahkan dan memperkuat perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; (d) kewenangan desa mengarahkan dan memperkuat desa sebagai subyek pembangunan, sehingga akan tumbuh kemandirian desa; (e) kewenangan desa akan membuat desa berdaulat secara politik dalam mengambil keputusan lokal sesuai dengan prakarsa dan kepentingan desa.

Dari ragu Pemerintah Daerah selama ini menempuh jalan pembinaan (yang diplesetkan menjadi pembinasan) dan imposisi (pemaksaan) terhadap desa. Pembinaan hadirkan dalam bentuk ceramah yang berisikan Perintah-petuah “harus begini” dan tidak boleh begitu” yang membuat ketakutan orang Desa (Eko, Sutoro dkk, 2014 : 131). Lemahnya kapasita dan kinerja Desa bukanlah fakta yang abadi. Pendampingan, jaringan dan pembelajaran yang berkelanjutan terbukti mampu mendongkrak kapasitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa (Eko, Sutoro dkk, 2014 : 132). Ini menjadi tantangan sendiri bagi Desa dalam menjawab banyak keraguan didalamnya.

Salah satu upaya dengan menguatkan SDM Desa dengan berbagai hal diantaranya dengan pelatihan atau bahkan dengan pemberian kebijakan untuk melanjutkan pendidikan. Kebanyakan para Aparatur Desa yang cuma lulusan SMA inilah yang menjadi rujukan untuk dikembangkan sebagai salah satu poin dalam menjawab kekhawatiran dalam tubuh Desa.

Fokus dalam pengembangan desa, sudah bukan menjadi alasan lagi masih kurangnya penguatan SDM Desa. Hal dengan lokus untuk kemajuan desa, istilah Desa Membangun tak bisa diwujudkan jikalau posisi Desa masih dianggap belum mampu untuk menjalani pemerintahannya sendiri, secara *Self Governing Community*. Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan dasar mengapa masih kurang pemahaman

serta pengetahuan dalam tubuh pemerintahan didesa. Tentu saja ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah desa saja, akan tetapi semua yang unsur harus mengambil peran. Dengan mengadakan program-program bimbingan teknis, pelatihan dan lain sebagainya. Menjadi salah satu cara dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan desa itu sendiri. Dengan meningkatnya kapasitas pemerintah desa, akan optimal pula kegiatan-kegiatan pemerintah didesa dengan tata pemerintahan yang baik.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif dengan model Kualitatif Fenomenologi. Pada pandangan Moleong menuturkan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk pada pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian semisal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode kualitatif ini sangat substansial pada hakikat dan hubungan antara penelitian dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang dihadapi.

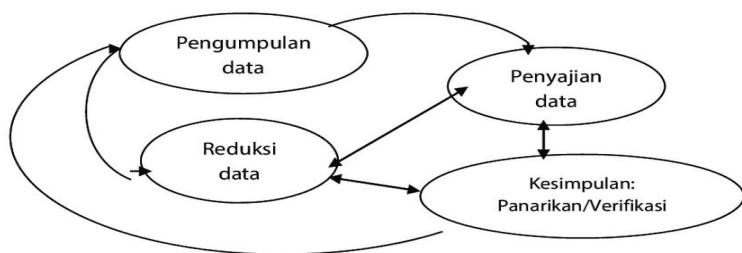
Arti kata dari fenomenologi secara etimologis yaitu berasal dari fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani, yaitu “phainesthai” artinya menampak, dan sinonim kata dari kata fantasi, fanton, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Aliran penelitian Fenomenologi menurut Husserl (1970, 1964) dan Schutz (1970) dalam bukunya “*The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy*”, mengatakan bahwa terdapat kekurang dan kehilangan jiwa meneliti dalam ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan penelitian yang menyangkut tentang penelitian sejarah, nilai kepercayaan, dan kebudayaan (Usop, 2019).

Dalam penelitian ini melihat bagaimana fenomena dari pelbagai penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan pada tatanan pemerintah desa yang masih relatif belum optimal dan cenderung stagnan, hal ini dengan pendekatan fenomenologi mendudukan secara konteks dalam peruntukan idealnya. Adapun karakteristik penelitian ini mengutamakan dan menghargai persepsi atau pendapat dari partisipan atau narasumber. Pendekatan fenomenologi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang memfokuskan kajian pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.

Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif murni dimana dalam pelaksanaannya yang berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomen-fenomen sebagaimana fenomen-fenomen itu sendiri. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian adalah peneliti sendiri, yang langsung terjun kelapangan.

Creswel (2008) telah menyajikan tahapan khusus penelitian kualitatif diantaranya yaitu (1) Identifikasi masalah; peneliti harus memulai apa yang menjadi sasaran penelitian, artinya menyangkut spesifikasi isu/fenomena yang hendak dipelajari/diteliti. (2) Literature review (penelusuran pustaka); bagian ini peneliti harus mencari bahan atau sumber

bacaan yang terkait fenomena yang akan diteliti, sehingga peneliti harus dapat menemukan kebaruan (novelty) atau kelebihan dari penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. (3) Menentukan tujuan penelitian; peneliti harus mengidentifikasi maksud/tujuan utama dari penelitiannya.



Gambar 2.1 : Analisis Data Model Interaktif

(4) Pengumpulan data; peneliti harus memperhatikan dalam memilih dan menentukan objek/partisipan yang potensial, guna menjangkau kemampuan partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian.

(5) Analisis dan interpretasi data (interpretation); data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis atau ditafsirkan sehingga menghasilkan gagasan atau teori baru. (6) Pelaporan; peneliti membuat laporan hasil penelitiannya dengan corak deskripsi, karena menggunakan metode kualitatif sehingga membutuhkan penggambaran secara luas dalam laporannya dan harus memposisikan pembaca seolah-olah sebagai orang yang terlibat dalam penelitian (Fadli, 2021).

B. Obyek Penelitian

Pada Penelitian melalui pendekatan pada strategi pemeintah dalam meningkatkan kapasitas pamong, pada Kalurahan Condongcatur, Sleman

Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari berbagai fenomena yang terjadi terkait masih kurang maksimalnya kapasitas perangkat desa dalam menunjang aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di pemerintah desa itu sendiri. Hal tersebut sehingga aspek kapasitas penting sebagai penunjang dalam proses tata pemerintahan yang baik. Dari ulasan tersebut dalam penelitian ini menunjukkan terkait upaya pemerintah kalurahan dalam meningkatkan kapasitas pamong.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kalurahan Condongcatur, Sleman Yogyakarta yang beralamat JL. Anggajaya No. 1 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta.

D. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian

Pada pengambilan subyek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa para narasumber berkompeten serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Tehnik penentuan serta pertimbangan dalam penentuan narasumber dengan purposive (Erlistiani et al., 2020).

Tabel 2.1 Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Reno Candra Sangaji,S.IP., M.IP.	Lurah
2.	Riska Dian Nur Lestari, S.Tp., M.Sc.	Carik
3.	Wahyu Nurendra	PLT. Jogoboyo
4.	Andree Setiawan, S.H.I	Tatalaksana
5.	Apri Nugroho, S.IP	Staf
6.	Idha Nurmarifah	Pendamping Kalurahan
7	Sukadi, S.E	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kapanewon Depok

Sumber : data diolah oleh penulis

Adapun pemilihan informan dalam penelitian ini merupakan sosok yang dinilai mempunyai interpretasi terkait topik penelitian yang diangkat. Diantaranya yakni ada figur sosok Lurah, Carik, Plt. Jogoboyo, Tatalaksana, Staf Kamituwo, Pendamping Desa yang terlibat dalam proses menejerial pemerintah kalurahan. Sementara itu dari pegawai Kapanewon Depok Sleman menjadi salah satu informan dalam proses penelitian ini terkait strategi peningkatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur. Informan sendiri memiliki kapabilitas dalam memberikan argumen-argumen strategis dalam penguatan kapasitas pamong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, 2012: 298 mengurai dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka pada penjelasannya menjabarkan :

- a. Observasi merupakan sebuah upaya melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala empirik awal di lapangan terkait konsep pelaksanaan strategi pemerintah dalam mengatualisasikan rencana dalam meningkatkan kapasitas pamong. Proses dengan mengumpulkan informasi-informasi melalui pemberitaan. Pada proses ini peneliti mengamati proses pelayanan dalam pemerintahan Condongcatur. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat berbagai diskusi ringan terkait peningkatan kapasitas sebagai penunjang dalam peruntukan ideal tupoksi sebagai pamong Kalurahan.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara terstruktur atau *In depth Interview* langsung kepada informan atau obyek penelitian yang terkait dengan penguatan kapasitas pamong. Proses wawancara dilaksanakan sebagai langkah awal dalam mengumpulkan informasi-informasi sebagai data dengan penguatan konten penelitian. Pada proses wawancara ini peneliti tidak hanya terfokus pada pedoman wawancara saja, akan tetapi memperdalam dari setiap pernyataan atau argumentasi dari informan. Secara konsen pedoman wawancara tersebut hanya bermuatan pada poros garis besar perwujudan dari pada pendekatan kapasitas secara runut teoritis sebagai strategis dalam penguatan kapasitas yang

dilaksanakan bagi pemerintah di Kalurahan Condongcatur itu sendiri.

Dalam proses wawancara tersebut peneliti mendalami setiap jawab dengan santai dan kisaran waktu yang digunakan berjam-jam. Mulai dari proses sebagai perangkat di Kalurahan Condongcatur sampai pada upaya yang sudah didapatkan dalam proses peningkatan kapasitas itu sendiri.

Berikut rincian proses wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti:

- 1) Tanggal 06 Desember 2023, wawancara Ibu Riska Dian Nur Lestari, selaku Carik Kalurahan Condongcatur.
- 2) 08 Januari 2024, wawancara Bapak Reno Candra Sangaji, selaku Lurah Kalurahan Condongcatur.
- 3) 29 Januari 2024, wawancara Bapak Sukadi, selaku Kepala Sub. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kapanewon Depok.
- 4) 05 Januari 2024, wawancara Bapak Andree Setiawan, Tatalaksana Kalurahan Condongcatur.
- 5) 17 Februari 2024, wawancara Bapak Wahyu Nurendra, selaku Plt. Jogoboyo.
- 6) 22 Februari 2024, wawancara Bapak Apri Nugroho, Staf Kamitudo Kalurahan Condongcatur.
- 7) 19 Maret 2024, wawancara Idha Nurmarifah, selaku Pendamping Kalurahan.

c. Dokumentasi merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam rangka pengumpulan data-data dan informasi terkait penelitian tersebut, baik dalam bentuk lembaran-lembaran data maupun dalam bentuk foto-foto dokumentasi. Dari pelbagai dokumentasi terkait dengan proses penguatan kapasitas, pula dalam dokumen yang menjabarkan program yang ingin dicapai terkait dengan meningkatnya kapasitas bagi pamong itu sendiri. Dokumen sendiri berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Condongcatur Tahun 2022-2027, dari dokumen tersebut terfokus pada penguatan kapasitas.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan model Kualitatif Fenomologi. Adapun peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan rangkaian kerja yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Punch, 2009) diantaranya meliputi tahapan; data reduction, data display, dan conclusion/verification. Mekanisme langkah kerja analisis data dilaksanakan setelah semua data primer dan sekunder berhasil dikumpulkan, maka dari itu langkah pertama yaitu memilah atau menyeleksi (*data reduction*) data tersebut kemudian difokuskan sesuai dengan fokus rumusan penelitian.

Secara umum, dalam suatu penelitian kualitatif pada proses analisis datanya banyak mengadopsi model analisis data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman yang mana metode ini adalah suatu metode analisis data dengan cara interaktif. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Prof. Dr. Sugiyono, 2005) menyatakan bahwa

kegiatan dalam proses analisis data kualitatif dilakukan dengan cara yang interaktif dan berkesinambungan dalam artian dilakukan secara terus-menerus sampai pada penyelesaiannya, dengan maksud sampai data yang dimiliki sudah menjadi jenuh. Tahapan di dalam suatu analisis data kualitatif ada 3 (tiga), yaitu tahapan reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi (Abdussamad, 2021).

a) Reduksi Data

Secara komprehensif data yang didapatkan sangat banyak dan bervariasi sehingga perlu kiranya dilakukan pencatatan dengan rinci. Semakin lama seorang peniliti berada dilapangan, maka semakin banyak data yang akan didapatkan dan dikumpulkan yang mana data tersebut sangat kompleks dan rumit. Maka dari itu, semua akan dilakukan analisis data melewati proses reduksi data. Mereduksi data sama artinya dengan meresume/merangkum data, menseleksi data-data yang dianggap pokok, menjadikan fokus hanya kepada hal-hal yang di anggap penting, dengan mencari tema dan polanya. sehingga data-data yang telah di analisis melalui proses reduksi data akan memberikan gambaran-gambaran yang jauh lebih jelas dan terarah, yang mana itu semua akan memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data-data selanjutnya jika diperluakan.

Analisis data pada tahapan mereduksi data di dalam penelitian kualitatif, peneliti akan selalu diarahkan oleh tujuan yang akan dicapai, yang mana yang akan menjadi orientasi pokok dari suatu penelitian kualitatif yaitu

pada hasil temuan. Maka dari itu, jika seorang peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya mendapatkan hal-hal yang mana dianggap asing, tidak berpola dan tidak dikenal, maka itulah yang seharusnya yang akan menjadi fokus perhatian peneliti pada tahapan proses reduksi data.

Reduksi data adalah tahapan-tahapan dimana seorang peneliti akan berpikir teliti dan, dengan wawasan yang mendalam, kecerdasan, dan juga keluasaan. Pada proses ini dalam merespon geliat dalam penelitian terkait dengan strategi pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas pamong. Dengan pendekatan berbagai informasi-informasi yang didapatkan diolah dengan melakukan pendalaman data. Proses reduksi melalui hasil analisa dari agrumen-argumen kemudian diolah menjadi narasi simpulan awal dari perlakuan narasi yang dimunculkan.

b) Display Data

Selanjutnya setelah data telah direduksi, maka tahapan selanjutnya adalah display data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, display data atau penyajian data dilakukan dalam suatu bentuk uraian-uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenisnya. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman menyatakan bahwa yang sering kali digunakan untuk display data atau menyajikan data yaitu dengan menggunakan kata-kata atau tulisan yang sifatnya naratif.

Adanya display data atau penyajian data, justru akan mempermudah pemahaman tentang apa-apa yang terjadi, selanjutnya untuk perencanaan

kerja setelahnya dengan didasari apa-apa yang telah dipelajari dan juga dipahami. Miles dan Huberman mensarankan agar didalam melaksanakan suatu bentuk display data atau menyajikan data, selain dengan kata-kata atau teks tulisan yang sifatnya naratif, juga dapat dilakukan dengan berbentuk dan berupa chart, jaringan kerja (Network), matrik maupun juga grafik. Dari proses penyajian data tersebut melalui perspektif yang dibangun berdasarkan perlbagai data yang didapatkan dalam menemukan sajian yang sesuai dengan konteks penelitian. Dari analisa sajian penelitian pada konteks peningkatan kapasitas pamong kalurahan di Condongcatur. Dengan pendekatan sajian teoritis kapasitas pula dengan tipe stratgeis menjadi aspek dalam proses penelitian ini.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Selanjutnya tahapan terakhir pada proses analisis data dalam suatu penelitian kualitatif menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yakni menarik suatu conclusion (kesimpulan)/verifikasi. Bentuk conclusion (kesimpulan)/verifikasi awal sifatnya hanya sementara, yang mana bisa saja selanjutnya dilakukan perubahan-perubahan jika tidak ditemukan bukti valid yang dapat mendukung dalam proses pengumpulan data-data selanjutnya.

Setelah data diseleksi, hasil analisis data disajikan berupa kutipan hasil wawancara, tabel, maupun gambar. Setelah tahap pertama dan kedua selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion/verification*) atas data yang telah berhasil diorganisir sebagai pada tahap akhir analisisnya.

Dari serangkaian kegiatan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti baru dapat menggunakan hasilnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan (Otienoh, 2009).

Sebaliknya, jika conclusion (kesimpulan)/ verifikasi awal yang dinyatakan tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan konsistensinya dan validitasannya ketika seorang peneliti melakukan pengumpulan data-data selanjutnya, maka conclusion (kesimpulan)/verifikasi awal tersebut akan bersifat kredibel. Maka secara garis besar apa-apa yang menjadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif secara tidak langsung akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak jika kesimpulan itu masih belum dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian. (Sugiyono, 2018)

Pada proses penarikan kesimpulan/verifikasi pada suatu penelitian ini, peneliti menemukan dari pendekatan starategis penguatan kapasitas bagi pamong yang dilaksanakan di pemerintah kalurahan Condongcatur. Adapun hasil menunjukkan yang menjadi fokus dalam pengembangan dengan pendekatan tipe strategis yakni *resource support strategy*. Strategi ini mengutamakan pada pengembangan SDM pamong di kalurahan dengan meningkatkan pendidikan, kegiatan studi banding, penguatan sistem dengan membangun koordinasi antar kelembagaan pamong kalurahan.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Uji kredibilitas (*credibility*) data dilakukan dengan triangulasi (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Prastowo, 2012: 266). Moleong (2016: 324) menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (Sutriani & Octaviani, 2019).

Dalam penelitian ini positifnya peneliti tidak dianggap sebagai orang yang menganggu karena sudah terbentuk rapor “*mutual trust*” sehingga kehadiran peneliti dibutuhkan (Stanback, 1988) dalam Sugiyanto 2022. Posisi peneliti juga terbantu dengan terbukanya Lurah Condongcatur dalam tema penelitian yang diangkat. Sehingga terbangun sebuah hubungan “*mutual trust*” dengan sangat baik. *Credibility* dapat dilakukan dengan

banyak cara, seperti perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat, dan trianggulasi (Creswell, 2016). Dalam proses penelitian melalui pengamatan dalam konteks peningkatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur. Ulasan dalam penelitian ini melihat pengembangan kapasitas bagi pamong yang dinilai sangat baik. Olehnya itu posisi penelitian mengulas konsep strategis apa yang kemudian dikembangkan di Kalurahan Condongcatur.

Kemudian proses selanjutnya dibangun dengan diskusi awal dengan dukuh di Kalurahan Condongcatur, terkait peningkatan kapasitas pamong di Kalurahan. Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan trianggulasi sebagai uji kredibilitas. Trianggulasi ini terbagi menjadi tujuh, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, triangulasi hasil, triangulasi solusi.

1) Trianggulasi Sumber

Tringulasi sumber berarti membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Proses trianggulasi sumber pada penelitian yang dilakukan di Kalurahan Condongcatur dilakukan kepada tujuh informan yang berasal 3 unsur yaitu pemerintah Kalurahan, Kapanewon, Pendamping Kalurahan

2) Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Trianggulasi teknik ini menggunakan wawancara partisipasi, observasi secara terus-menerus, dan dokumentasi penelitian agar data yang diperoleh semakin valid (Sugiyono, 2016). Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. Dalam proses wawancara didalam penelitian ini, peneliti lebih menganalisis hasil observasi lapangan. Diskusi dengan informan pada penelitian ini dalam prosesnya selama kurang empat bulan menyuguhkan data valid dengan konteks strategis peningkatan kapasitas.

3) Trianggulasi Waktu

Makna dari Triangulasi Waktu ini ialah bahwa seringkali waktu turut mempengaruhi daya dapat dipercaya data. Misalnya, data yang dikumpulkan di pagi hari dengan teknik wawancara dimana saat itu narasumber masih segar dan belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. cara melakukan pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2013b). Pada penelitian ini memastikan baik secara relasi antar pamong dalam peningkatan

kapasitas dengan menumbuhkan tiga konsep kapasitas yang dikemukakan

Robert L. Katz (1955) terkait dengan kemampuan dasar *Technical Capacity, Human Skill, Conceptual Skill*. Selain itu peneliti juga melihat dari segi pendekatan tipe strategis dalam proses peningkatan kapasitas di Kalurahan Condongcatur.

4) Trianggulasi Solusi

Peneliti tidak sekadar mencari data kemudian menemukan masalah dan dianalisis, serta hasil analisis dituliskan dalam laporan penelitian. Akan tetapi, dalam rujukan hasil yang ditemukan kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan alternatif solusi. Dari solusi yang ditawarkan yakni dalam membangun koordinasi lebih dioptimalkan lagi dalam hal komunikasi baik antara pamong maupun dengan masyarakat, kemudian mengadakan pertukaran pengetahuan antara Pemerintah Kalurahan dengan Kapanewon, serta kelembagaan lainnya dalam menumbuhkan pengetahuan terkait dengan manajerial pemerintah kalurahan.

5) Trainggulasi Hasil

Trianggulasi temuan atau konfirmabilitas, dimaksudkan agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan trianggulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancara (Sugiyanto, 2022).

Terianggulasi temuan yang didapatkan sebagai poin strategis dalam pengembangan serta peningkatan kapasitas perangkat desa secara garis umumnya pada persiapan SDM dalam membangun sistem manejerial didesa. Hal ini diharapkan dalam penelitian di Kalurahan Condongcatur dari segi peningkatan kapasitas bagi pamong dalam kebermanfaatan pada ranah secara praktis.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penguatan kapasitas Pamong di Kalurahan Condongcatur diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pamong dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada struktural pemerintahan. Adapun dalam penelitian ini melalui kajian Robert L. Katz terkait dengan kemampuan dasar *Technical Capacity, Human Skill, Conceptual Skill.*

1. *Technical Capacity*

Dari kapasitas teknis ini dapat dikategorikan kedalam dua poin yang menjadi fokus pengembangan dalam meningkatkan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur dari segi kapasitas teknis. Melalui studi orientasi dan koordinasi. Kedua konsep yang tersebut menggambarkan bagaimana letak kapasitas teknis dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman akan orientasi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pamong.

2. *Human Skill*

Kemampuan individu pada penguatan bagi pamong sendiri berdasarkan dari hasil penelitian diantaranya yakni studi banding, pemahaman tupoksi, rekrutmen pamong. Orientasi dari pamong dalam meningkatkan kapasitas individu-individu menjadi orientasi penting yang mesti dikembangkan oleh pamong. Sebagai upaya dalam menjaga kompetensi serta pemahaman akan pelaksanaan tupoksinya masing-masing.

Membangun komitmen dalam menjalankan tugas dengan baik demi menciptakan kolerasi antara pemerintah dengan Masyarakat.

3. *Conseptual Skill*

Kemampuan konseptual dalam penguatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur diantaranya studi lanjutan, Bimtek. Orientasi dari kemampuan konseptual yaitu mengukur kemampuan dalam memutuskan serta menentukan kebijakan strategi dalam merumuskan kebijakan. Tentunya kemampuan konseptual tersebut tidak dapat mengcapai titik tanpa adanya kemampuan pamong dalam menejerial kebijakan.

Penelitian ini menunjukkan selain aspek pendekatan kapasitas pula pada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kapasitas pamong, terlihat pada pendekatan lebih dominan pada konteks *resource support strategy*. Dengan mengutamakan strategi dalam pengembangan sumberdaya manusia. Secara generalnya strategi penguatan kapasitas yang dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur secara pendekatan tipe-tipe strategi. Adapun yang dominan yakni *resource support strategy*, posisi tersebut menunjukkan konsen dalam penguatan mendasar pada penguatan SDM. selain itu tipe strategi lainnya yakni *corprorate strategy* dan *institusional strategy*.

B. Saran

Penguatan kapasitas bagi Pamong di Kalurahan Condongcatur dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan di tingkat lokal.

1. Meningkatkan koordinasi baik secara formal maupun non forma dengan masyarakat melalui RT RW dan Dukuh serta koordinasi antar sesama Pamong dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan manajemen pemerintahan, perencanaan, pembangunan dan lain sebagainnya.
2. Memastikan pengembangan SDM pamong melalui mentor dan pendampingan dalam memberikan pengalaman serta membimbing Pamong dalam memastikan peruntukan tupoksinya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku serta mendorong peningkatkan kapasitas mereka. Kemudian mengadakan pertukaran pengetahuan antara Pemerintah Kalurahan dengan Kapanewon, serta kelembagaan lainnya dalam menumbuhkan pengetahuan terkait dengan manajerial pemerintah kalurahan.
3. Memprogramkan pendidikan khusus bagi pamong dalam menfokuskan pada tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, atau manajemen keuangan serta pengetahuan Teknologi pemerintahan.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan, olehnya itu dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya, adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini meneliti terkait strategi penguatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Condongcatur dengan pendekatan analisis teori kapasitas yakni technical skill, human skill, conceptual skill kemudian di kombinasikan dalam tipe strategis. Namun dalam prosesnya tidak berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses peningkatan kapasitas secara mendalam.
2. Menelisik dalam penelitian ini terkait kebijakan penguatan kapasitas utamanya pada indikator keberhasilan yang belum terdefinisi, sehingga tolak ukur dalam proses penguatan kapasitas secara jelas berdasarkan pendekatan teori lainnya.
3. Masih terdapat kelemahan-kelemahan tersebut memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif, penelitian yang lebih mendalam dan berkelanjutan juga penting untuk memastikan penguatan kapasitas yang efektif dan berkelanjutan di Kalurahan Condongcatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Asit, M. Y. A., Jeddawi, M., Rowa, H., Chen, S., Modal, I., Dan, S., Intelektual, M., Pengembangan, D., Di, B., Empang, D., Koto, K., Kabupaten, G., Agribisnis, J., Pertanian, F., Riau, U., Pencaharian, M., Kusuma, I. L., Desa, P. K., Negara, T. L., ... Ii, B. A. B. (2020). Pemberdayaan Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara *Visioner*, 16(02), 48–54. <http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/291>
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Ayuningtyas, D. P. (2023). Tingkat Kedisiplinan Kerja dengan Pemanfaatan Fasilitas Kantor Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Kantor Pemerintah Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(1), 36–44.
- Erlistiani, M., Syachruroji, A., & Andriana, E. (2020). Penerapan Model Pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create and Share) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 13(2), 161–168. <https://doi.org/10.33369/pgsd.13.2.161-168>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ginting, A. H., Wardana, D., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211–219. <https://doi.org/10.33701/jiwp.v10i1.874>
- Ginting, Y., & Daeli, S. (2012). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir). *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 105–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.105-116>
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2270>
- Ichwan, S. (2019). Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Noken*, 5(1), 81–98.
- Jennifer. R. Dhue1, F. B. T. (2021). Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa di Desa Oben Kabupaten Kupang. *Jurnal Pemerintahan*, 2(2), 335–356.
- Kapriaji, M. N., & Siswidiyanto, S. (2022). Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 241–255. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.14>

- Khaidir Ali, A. S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Krisjuyani, S. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Membangun Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 198–205.
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jap*, VII(103), 38–49.
- Muslimah, S. S., Hermawan, D. D., & ... (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jpbm*, 2(2), 63–75. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/36645%0Ahttp://repository.lppm.unila.ac.id/36645/1/Jurnal Siti%2C Dedy%2C Nur.pdf>
- Mustari, N., Sulastri, S., Sulfiyanti, S., & Syukri, U. (2022). STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR PASCA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VII(02), 82–88.
- Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Mamuju. *Jurnal Ilmiah Akademik (PUJIA)*, 1(1), 145–161. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8787-Full_Text.pdf
- Nugraha. (2019). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v1i3.334>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547>
- Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2016). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 1010–1016. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/589>
- Otienoh, R. O. (2009). Reflective practice: the challenge of journal writing. *Reflective Practice*, 10(4), 477–489. <https://doi.org/10.1080/14623940903138332>
- Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional

- Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210–229. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal EL-RIYASA*, 13(1), 76. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.18174>
- Satria, A., & Rosnani, T. (2021). Pemberdayaan SDM Aparatur Pemerintahan Desa. *Proceeding Seminar Bisnis*, 5, 1–11.
- Sugiyanto. (2022). Dampak Triangulasi Hasil terhadap Keberlanjutan Organisasi dalam penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. *Media Bina Ilmiah*, 16(8), 1–23.
- Sugiyono. (2018). Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan. In *Revista de Química* (Vol. 9, Issue 1, pp. 1–14). [https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i1.102](http://ctic-cita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica_valoriz_ANICE.pdf%0Ahttp://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf%0Ahttps://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPS-CT002019.pdf%0Ahttp://www.bdigital.unal.edu.co/6259/%0Ahttp://onlinelib</p>
<p>Suhendar, D. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Desa. <i>Jurnal Ilmiah Neo Politea</i>, 1(1), 43–61. <a href=)
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Keabsahan data. *INA-Rxiv*, 1–22.
- Syahruddin Hattab, Daswati, R. (2022). Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pembangunan Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *SiKemas Journal*, 1(2022), 23–30.
- Tamam, B. (2023). Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia Pendahuluan. *Annual Conference on Islam, Education, and Humanities*, 2, 109–124.
- Tauvik, I., Endah, K., & Mutholib, A. (2023). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Desa Cisontrol Kecamatan Ranca Kabupaten Ciamis. *Repository Unigal*, 3(1), 278–290.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Triaji, E. (2023). Kajian Manajemen Pemerintahan Desa. In *repository unpas*.
- Untari, S., Habibi, M. M., Mu, A., Fauziah, L. N., & Ardhana, A. (2022). CAPACITY OF VILLAGE APPARATUS IN IMPLEMENTING VILLAGE GOVERMENT ADMINISTRATION. *Jurnal Praksis Dan DediKasi (JPDS)*, 5(2), 80–87.
- Usop, T. B. (2019). Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi dan Etnografi. *Researchgate.Net*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15786.47044>
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & rahmat, H. K. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam

Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606.

Regulasi

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber-sumber lainnya:

Website Pemerintah Kalurahan Condongcatur
<https://condongcatusid.sleman.kab.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SURAT IZIN PENELITIAN KAMPUS



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**
Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: www.s2ip.apmd.ac.id

AKREDITASI-B SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017

Nomor : 216/S-2/XI/2023
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

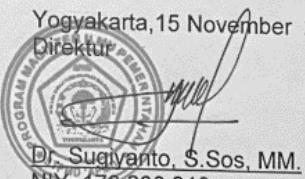
Kepada Yth,
Lurah Condongcatur
Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM MEINGKATKAN KAPASITAS PAMONG**
dengan Dosen Pembimbing : Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama	:	Ashar Abdillah
Nomor Mahasiswa	:	22610018
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	:	2023/2024
Waktu Penelitian	:	4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 November 2023
Direktur


Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIK 170 230 210

2. SURAT KETERANGAN PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jalan Anggajaya II / 01 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, 55283
Telepon : (0274) 885689, Email : condongcatur1946@gmail.com

34.04.07.2003

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 036

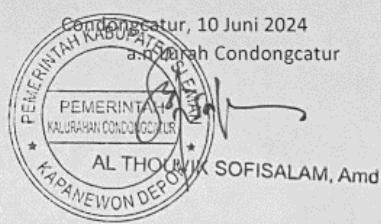
Bersama ini kami Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan Surat Keterangan Kegiatan di wilayah Kalurahan Condongcatur dari:

Nama	:	Ashar Abdillah
NIM	:	22610018
Program Studi	:	Ilmu pemerintahan
Perguruan Tinggi	:	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
Keperluan	:	Mengadakan Penelitian untuk Tesis
Lokasi	:	Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PAMONG**" Penelitian dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.

Demikian agar menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapan terimakasih.

Condongcatur, 10 Juni 2024
an. Lurah Condongcatur



3. PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Informan	Dokumen
	Technical Skill		
1.	Dalam meningkatkan kapasitas pamong, program-program seperti apa yang dilaksanakan?	1. Lurah 2. Carik 3. Plt. Jogoboyo 4. Tata Laksana 5. Staf 6. Pendamping Desa 7. Kapanewon	
2.	Apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas pamong?		
3.	Meningkatkan kesejahteraan bagi pamong, sering kali masih belum diperhatikan, hal ini tentu saja banyaknya akan mempengaruhi maksimalnya pelaksanaan pemerintahan di kalurahan itu sendiri?		
4.	Bagaimana dalam mengklasifikasikan pamong kalurahan dengan kompetensi yang ada dalam posisi yang ideal		
5.	Dalam meningkatkan kapasitas biasanya diikutkan dengan kegiatan pelatihan, bagaimana dampak dari pelatihan tersebut dalam menunjang kinerja?		
6.	Apa saja bentuk-bentuk dalam meningkatkan kapasitas pamong? Bagaimana menumbuhkan disiplin kerja bagi pamong Kalurahan?		
7.			

8.	Apa faktor pendukung dalam upaya penguatan kapasitas pamong?		
	Human Skill		
9.	Bagaimana Posisi Pendamping Desa dalam memberikan pendampingan, jaringan dan pembelajaran dalam meningkatkan kapasitas pamong Kalurahan?	1. Lurah 2. Carik 3. Plt. Jogoboyo 4. Tata Laksana 5. Staf 6. Pendamping Desa Kapanewon	
10.	Desa sering dipandang kurang mampu dalam mengelola pemerintahannya, hal ini mengapa ada pendamping desa. Sejauh mana keberhasilan pendamping desa itu sendiri dalam mendampingi desa?		
11.	Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas pamong di Kalurahan Condongcatur?		
12.	Apa saja program dalam meningkatkan kapasitas pamong dalam hal, peningkatan kemampuan pamong?		
13.	Dalam pemahaman prosedure, tugas dan fungsi masing-masing pamong		

	<p>tentunya tak terlepas dengan adanya kompetensi pamong itu sendiri, bagaimana dalam memposisikan pamong sesuai dengan kompetensi?</p> <p>14. Bagaimana memberikan pemahaman serta kompetensi pamong dalam bidang kerja ditataran pemerintahan?</p>		
15.	Dalam menciptakan iklim atau culture profesional dalam Pamong Kalurahan, seperti apa upaya yang dilakukan?		
16.	Seperti apa situasi culture profesional pamong dalam meningkatkan kompetensi?		
Conceptual Skill			
17.	Dalam meningkatkan kemampuan kompeten Pamong dengan pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pembelajaran, khusunya di Kalurahan Condongcatur. Seperti apa pelaksanaanya?	1) Lurah 2) Carik 3) Plt. Jogoboyo 4) Tata Laksana 5) Staf 6) Pendamping Desa 7) Kapanewon	
18.	Bagaimana menumbuhkan pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok serta kemampuan dalam		

	<p>menjalankan tugas sebagai pamong Kalurahan?</p> <p>19. Demi meningkatkan kapasitas pamong , salah satunya dengan menggadakan pelatihan atau pengembangan SDM, pengembangan apa saja yang menjadi program dalam meningkatkan kapasitas pamong di Kalurahan?</p> <p>20. Demi mewujudkan kapasitas SDM utamanya Pamong profesional dapat di pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban. Bagaimana meningkatkan utamanya terkait peningkatan pendidikan pamong?</p>		
--	--	--	--

4. DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Lurah Condongcatur



Wawancara Carik Kalurahan Condongcatur



Wawancara Plt. Jagabaya Kalurahan Condongcatur



Wawancara Tatalaksana Kalurahan Condongcatur



Wawancara Staf Kalurahan Condongcatur



Wawancara Pendamping Kalurahan